

**ANALISIS KEBERMANFAATAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

MUTIARA BAKRI

NIM 105431100220

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kebermanfaatan Bantuan Sosial Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Didesa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Mutiara Bakri
Stambuk : 105431100220
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 21 Juli 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Sugiati., M.Pd
NIDN.0018056002

Pembimbing II

Rismawati S.Pd.,MPd
NIDN. 0910078903

Diketahui Oleh:

Dekan
FKIP Unismuh Makassar



Ketua Prodi
PPKn-FKIP Unismuh Makassar





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Mutiara Bakri** NIM 105431100220 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 264 Tahun 1446 H / 2024 M pada tanggal 22 Shafar 1446 H / 27 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024.

Makassar, 26 Shafar 1446 H
31 Agustus 2024 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Sugiyati, M.Pd. (.....)
2. Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd. (.....)
3. Dr. Suardi, M.Pd. (.....)
4. Rismawati S.Pd., M.Pd (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaran



Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM: 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Bakri

Nim 105431100220

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul skripsi : Analisis Kebermanfaatan Bantuan Langsung Tunai Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulo-Bulo Kabupaten
Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar adanya.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

Mutiara Bakri

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Bakri

NIM 105431100220

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian seperti berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun);
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan pimpinan kampus;
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain dalam penyusunan skripsi;
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat perjanjian

Mutiara Bakri



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mutiara Bakri

Nim : 105431100220

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup bukan tentang dunia saja maka perbaikilah dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik walaupun kamu mempunyai segudang dosa dalam hidup”

“letakkan aku dalam hatimu,,maka aku akan meletakanmu dalam hatiku”

(QS.Al-Baqarah:152)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, saudara, sahabat, serta teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikanskripsi ini.



ABSTRAK

Mutiara Bakri, 2024. Analisis kebermanfaatan bantuan dana sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Bulu-Bulu, Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi sugiati Pembimbing 1 dan Rismawati Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana system penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto dan hambatan dari adanya penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yaitu lembar konsuner, lembar observasi, dan alat atau bahan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, konsuner, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengikuti teori Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian Analisis kebermanfaatan bantuan dana sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. Penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat didesa Bulu-Bulu adalah (1) Adanya Sistem penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat dan (2) Adanya tantangan Hambatan yang di rasakan masyarakat selama penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci: Analisis kebermanfaatan bantuan dana sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Mutiara Bakri, 2024. Analysis of the usefulness of government social funding assistance on the welfare of the community in Bulo-Bulo village, Jeneponto Regency. Thesis. Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Dra. Andi Sugiati, Supervisor 1 and Rismawati, Supervisor II.

The aim of this research is to find out how the direct cash assistance distribution system affects the welfare of the community in Bulo-Bulo village, Jeneponto Regency and the obstacles to the distribution of direct cash assistance on the welfare of the community in Bulo-Bulo village, Jeneponto Regency.

The type of research used in this research is qualitative research. Research instruments for collecting data are consumer sheets, observation sheets, and documentation tools or materials. Data collection techniques use observation, consultation and documentation. The data analysis technique follows Miles and Huberman's theory, namely data condensation, data presentation and drawing conclusions or verification.

Research results Analysis of the usefulness of government social funding assistance on the welfare of the community in Bulo-Bulo village, Jeneponto Regency. The distribution of direct cash assistance to the welfare of the community in Bulo-Bulo village is (1) The existence of a system for distributing direct cash assistance to the welfare of the community and (2) The existence of challenges. Obstacles felt by the community during the distribution of direct cash assistance to the welfare of the community.

Keywords: Analysis of the usefulness of government social funding assistance for community welfare

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan dan menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisis Kebermanfaatan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, sampai akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M. T., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dra. Jumiati Nur, M. Pd. Sebagai Penasehat Akademik
5. Ibu Dra. Andi Sugiati Sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Rismawati, S.Pd., M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya serta memberikan arahnya guna dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada

penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

7. Bapak Irsal, SE selaku Kepala Desa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta Bapak/Ibu dan staf pemerintah desa yang telah memberikan bantuan dan arahan selama melaksanakan penelitian dan masyarakat atas partisipasinya selama penelitian.
8. Kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda Bakri dan Pintu surgaku Ibunda Suriani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulis kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun meraka mampu senang tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Kepada saudara Kandung saya Tenriana Bakri serta kakak sepupu saya Salmi Putri Damayanti S.Pd. yang turut memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa keponakan saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Sahabat sekaligus sepupu saya yang tak kalah penting kehadirannya, Arika ramadani, terimakasih selalu ada dalam titik rendah saya dan terimakasih selalu ada dalam titik rendah saya dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.
11. Kepada Saudari tersayang penulis, Nur Elmi, Siti Nurul Izza Widia Rahma, Asni Arifin, Cantika Ananda, Nurcitra Amalia Anfar dan Salsabila Pasa yang telah menasehati, mendukung dan semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan bagai saran saat penulis mengalami dan membantu material untuk memenuhi kebutuhan penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi.
12. Dan teruntuk Rekan-rekan kelas PPKn 20 terimakasih telah bersama-sama berjuang selama 4 tahun ini. Mulai dari daring, sesi ganjil genap dan akhirnya kita bisa belajar diruangan yang sama dengan formasi lengkap 19 orang. Kita lebih dari teman, kita keluarga. terimakasih juga

sudah memberikan banyak pelajaran serta pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan.akhirnya kita ada dititik ini selamat melanjutkan perjalanan,kenangan kita akan tetap abadi,I will always miss you guyss

13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, yang tidak sempat disebutkan namanya.
14. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT yang Maha Sempurna kiranya senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta meridhai seluruh aktivitas keseharian kita. *Aamin ya Robbal 'Alamin.*

Makassar, 24 Juli 2024

Penulis

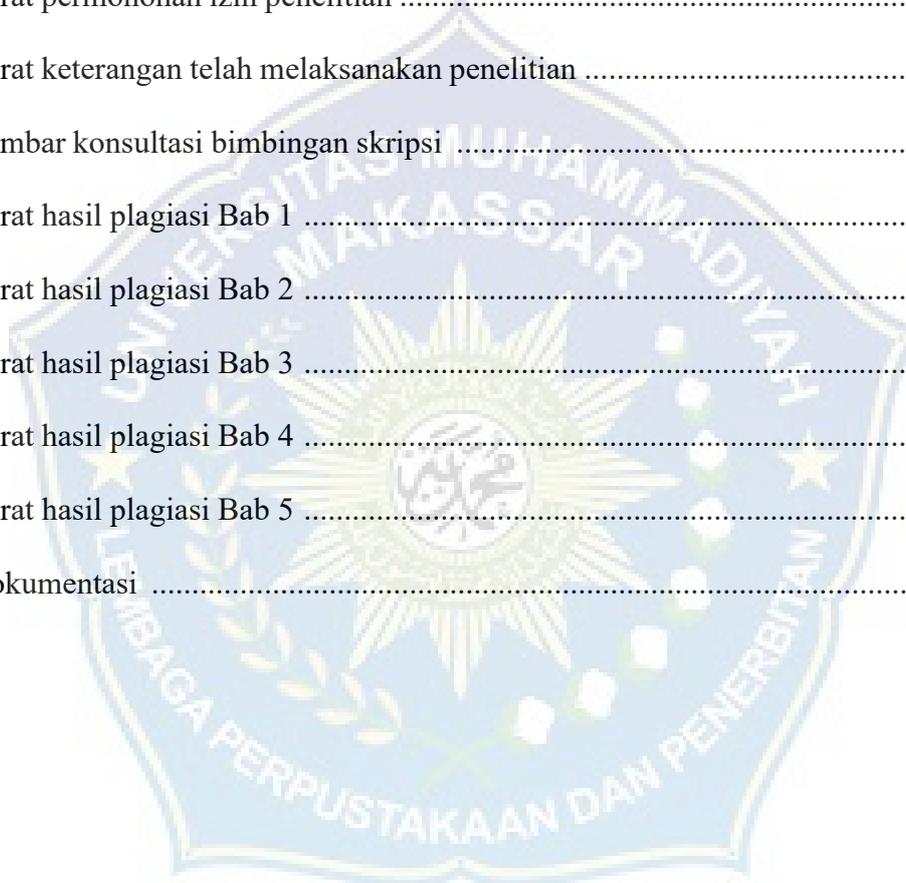
DAFTAR ISI





DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Kuesioner.....
Lembar berita acara ujian proposal
Lembar perbaikan seminar proposal
Surat pengantar penelitian
Surat permohonan izin penelitian
Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
Lembar konsultasi bimbingan skripsi
Surat hasil plagiasi Bab 1
Surat hasil plagiasi Bab 2
Surat hasil plagiasi Bab 3
Surat hasil plagiasi Bab 4
Surat hasil plagiasi Bab 5
Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk merancang dan melaksanakan undang-undang serta mengatur masyarakat sebuah negara. Selain itu, sebagai pemberi layanan wajib, pemerintah harus dapat memahami dan mematuhi prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi dan kejelasan informasi. Ini penting untuk mencegah masalah sosial baru muncul. Sangat penting untuk memperluas dan memperluas saluran komunikasi. Di antara berbagai jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah, peneliti akan berkonsentrasi pada Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Undang-undang menugaskan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan fakir miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan sosial yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Pengamatan ini di berikan kepada pemerintah agar dapat memelihara kesejahteraan Masyarakat yang kurang mampu dalam kebutuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sudah banyak yang sudah di lakukan hal ini yang membuat banyaknya program BLT yang di berikan pemerintah kepada masyarakat cara ini di lakukan Untuk menanggulangi Kemiskinan yang terjadi dengan banyak program yang diluncurkan di harapkan

program-program tersebut dapat menanggulangi kemiskinan. Program BLT kemiskinan Di Indonesia, anggaran negara (APBN) memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sejak tahun 2004 hingga 2014, berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan mulai mendapatkan perhatian, termasuk program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memberikan uang secara berkala, Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), serta program-program peningkatan keterampilan seperti pelatihan dan modal usaha melalui PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).(Maharsani, 2022).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) global pada saat itu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka guna meningkatkan kesejahteraan. Walaupun terdapat berbagai kontroversi dan kritik, beberapa pihak menganggap pelaksanaan program BLT sebagai berhasil. Pemerintah meluncurkan program BLT untuk pertama kalinya pada tahun 2005 sebagai upaya untuk menangani dampak kenaikan harga terhadap kelompok masyarakat miskin.

Dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan batas maksimum 35% dari total dana desa yang diterima oleh desa tersebut. Jika alokasi dana desa untuk BLT tidak mencukupi, kepala desa dapat mengalokasikan dana desa melebihi batas tersebut setelah memperoleh persetujuan dari bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian, kepala desa memiliki tanggung jawab tidak hanya

dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga dalam pelaksanaan penyaluran BLT desa. Apabila pemerintah desa tidak menganggarkan atau melaksanakan BLT desa sesuai dengan arahan pemerintah, desa tersebut akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa pada tahap ketiga untuk tahun anggaran yang bersangkutan. (Maryam & Cahyani, 2022).

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa syarat diberlakukan mulai Oktober 2005 hingga Desember 2006, dengan tujuan untuk membantu 19,2 juta keluarga miskin sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga minyak global pada tahun 2004. Ketika harga minyak dunia naik lagi pada tahun 2008, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program BLT sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2005, sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. (Yusuf et al., 2020).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebijakan yang diterapkan mencakup perbaikan pada program perlindungan sosial sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Langkah awalnya adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi berbagai guncangan hidup, seperti penyakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, serta bencana atau bencana alam. Sistem perlindungan sosial yang efektif dirancang untuk mencegah individu atau masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan tersebut. Berdasarkan peraturan yang ada, pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini mencakup beberapa

program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, seperti: (a) Program Simpanan Keluarga Sejahtera; (b) Program Indonesia Pintar; dan (c) Program Indonesia Sehat. (Murdiyana dan Mulyana, 2017:87).

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bantuan sosial (Bansos), seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Salah satu bentuk bantuan sosial adalah BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan batas maksimum 35% dari total dana desa yang diterima desa tersebut. Jika alokasi dana desa untuk BLT tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan dana desa melebihi batas tersebut setelah memperoleh persetujuan dari bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk. Ini berarti bahwa kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan dana desa tetapi juga atas penyaluran BLT desa. Apabila pemerintah desa tidak menganggarkan atau melaksanakan BLT desa sesuai dengan instruksi pemerintah, desa tersebut akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa pada tahap ketiga untuk tahun anggaran yang bersangkutan. (Maryam & Cahyani, 2022).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan berupa uang tunai untuk keluarga miskin yang bersumber dari Dana Desa. Setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria akan menerima BLT-DD sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, dan Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan ini bebas pajak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pelaksanaan BLT-DD harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran dengan dukungan data yang valid

dan akurat. Walaupun BLT-DD dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sering kali bantuan ini disalahgunakan untuk tujuan yang kurang penting. Aturan mengenai bantuan sosial ini mengharuskan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana dari APBDes untuk masyarakat yang kurang mampu, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan mereka. Kriteria penerima BLT desa meliputi keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa tersebut, dan calon penerima harus dipastikan tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, atau Kartu Prakerja. Pendataan penerima BLT desa akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. (Syamsudin, 2022).

Pemerintah terus berusaha mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial, meskipun masih terdapat berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang diterapkan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa meskipun data penerima bantuan sosial tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di luar DTKS, masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Keterbatasan jumlah bantuan sosial menyebabkan distribusi yang tidak merata. Untuk mengurangi potensi dampak sosial yang mungkin timbul, pemerintah menerapkan kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat..(Mukhlisah & Irfan, 2023).

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di desa bulo-bulo Kabupaten Jenepono fenomenan yang sering di jumpai pada saat penerimaan bantuan dana

sosial masih banyak masyarakat yang mengeluh karna bantuan yang di kelolah pemerintah desa tersebut tidak tepat sasaran, dalam hal ini bantuan dana sosial yang di terima masyarakat, masih banyak terjadi kesenjangan sosial dalam pembagian bantuan Langsung Tunai di antaranya keluhan masyarakat yaitu, adanya, system orang dalam.

Hal ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahpahaman dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat. Kerja sama antara berbagai instansi sangat penting, karena untuk memperoleh data masyarakat miskin diperlukan pendataan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Data mengenai masyarakat miskin harus benar-benar valid, karena bantuan sosial ini ditujukan hanya untuk mereka yang tidak mampu dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara optimal. Pendataan dilakukan dengan menjalin kerja sama antara instansi sosial dari tingkat tertinggi hingga yang paling bawah. Di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Jenepono, kerja sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai dimulai dari pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengatasi masalah pendataan yang masih tidak valid, karena ada masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi tetap ingin menerima Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Jenepono pada 25 Januari 2024, terdapat beberapa data terkait penerima Bantuan Sosial. Terdapat 1.801 Kartu Keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Pada tahun 2023, 76 Kartu Keluarga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran dana desa sebesar Rp 273.600.000. Selain itu, 241 Kartu

Keluarga menerima sembako dari dinas sosial, 119 Kartu Keluarga menerima Program Keluarga Harapan (PKH), 2 Kartu Keluarga menerima sembako PPKM, dan 1.323 Kartu Keluarga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program Bantuan Sosial yang disalurkan oleh pemerintah di Desa Bulu-Bulu diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi penerima. Namun, selama proses distribusi BLT, sering kali muncul keluhan dari masyarakat mengenai ketepatan sasaran, dengan beberapa orang merasa bahwa ada sistem favoritisme dalam pembagian. Meskipun demikian, BLT sangat dinantikan oleh masyarakat karena memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan, namun tingginya populasi di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan. Dalam konteks perekonomian yang lebih luas, kegiatan ekonomi saling berhubungan dan semakin dinamis, dengan munculnya jenis kegiatan baru untuk mengisi kekosongan dalam suatu sektor, yang tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dari sektor lainnya.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Kebermanfaatan Bantuan Sosial Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu-bulu Kabupaten Jeneponto”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana hambatan dari adanya penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui sistem penyaluran bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk Mengetahui hambatan dari adanya penyaluran bantuan langsung tuni terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut adalah manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis:

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, menambah pengetahuan, serta menjadi referensi bagi pembaca mengenai penggunaan dan dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Jeneponto.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis dalam menyusun karya ilmiah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang Kesejahteraan Sosial mengenai penggunaan dan dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Jenepono.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas mengenai pemanfaatan dan dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu-Bulu, Kabupaten Jenepono.
- b. Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat terkait dampak bantuan sosial.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. KAJIAN TEORI

a. Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (Bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Tumbel et al., 2021).

Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Pada Bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya

beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi BBM diterapkannya suatu kebijakan. Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial.(Nafiah & Bharata, 2021).

Dana Bantuan Langsung tunai (BLT) bukan pembentukan penyelesaian jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi merupakan penyelesaian jangka pendek yang bertujuan agar rumah tangga miskin (RTM) atau masyarakat miskin dapat terhindar dari tindakan seperti menjual aset yang dimilikinya, putus sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penerapan BLT yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa program ini dapat menunjang (RTM) untuk melindungi daya beli dan menjaga kemampuan dalam mengakses kesehatan dan pendidikan.

Program bantuan langsung tunai ini dibentuk supaya masyarakat yang telah dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau (RTM) dapat terhindar dari resiko-resiko sosial, serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa jenis program yang telah pada saat ini. Seperti PKH, BLT, BSM, Jamkesmas, dan juga program lainnya. Untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria-kriteria dalam menentukan

siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.(Putra & Medinal, 2019)

2. Tujuan serta Program Bantuan Langsung Tunai

Tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai pun tidak lain adalah untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Langsung Tunai dicairkan setiap triwulan. Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM yaitu:

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama Depsos, 2008

(Tumbel et al., 2021)

Setiap program pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai , termasuk tujuan dari program bantuan langsung tunai ini. Program bantuan langsung tunai ini memiliki tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi, masyarakat yang di maksud adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah masa pandemi dan mereka yang rentan terkena dampak dari adanya pandemi ini. Dalam suatu program, dikatakan efektif apabila tujuan dari program tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Efektivitas program yang dimaksud merupakan suatu yang menunjukkan keadaan dari tingkat kebersihan yang dapat dicapai dari suatu usaha.(Jehosua, 2022).

Setiap rencana pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan dari rencana Bantuan Langsung Tunai. Rencana pemberian BLT tunai dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat selama pandemi, dan mereka yang rentan terhadap pandemi. Dalam sebuah rencana, jika tujuan dari rencana tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, maka dikatakan efektif. Efektivitas rencana yang dimaksud menunjukkan keadaan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai organisasi.(Wulandari, 2021)

3. Kriteria Penerima BLT

Hal ini didasarkan Ada 14 kriteria untuk mendapatkan Dana Desa BLT, jika diterapkan semua akan sangat sedikit orang yang akan menerima BLT tersebut, maka dari itu penentuan standar kriteria dilakukan dengan sesuai keputusan Kepala Desa dan berdasarkan musyawarah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bahwa “Penerima BLT ada 14 standar, tapi kalau kita terapkan semua 14 standar, sedikit orang yang dapat. Penerima BLT desa ada 4 standar: tidak bisa bekerja dan tidak punya sanak saudara, janda, atau berpenghasilan di bawah 60 tahun. Duda rupiah Indonesia 500.000 orang dengan anggota keluarga (anak-anak) dan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan setiap hari termasuk dalam standar keluarga miskin. Setidaknya ada 9 dari 14 standar keluarga miskin.Hanya sanggup

makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.(Wulandari, 2021)

Evaluasi tahapan implementasi atau pelaksanaan dilakukan pemerintah Desa dengan tim verifikasi untuk menetapkan nama kepada calon penerima BLT. Tahapan akhir yang dilakukan yaitu evaluasi tahap akhir setelah pelaksanaan dilakukan dengan guna mengevaluasi keluarga penerima BLT tahap pertama untuk dievaluasi bersama untuk penyusunan ke depan nama-nama yang menerima bantuan, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum, dan untuk bahan acuan pengurangan atau penghapusan untuk tahapan selanjutnya.(Wulandari, 2021)

Proses selanjutnya pada penetapan program BLT adalah pihak pusat apabila dari pusat telah menentukan calon yang berhak mendapatkan BLT mereka akan mengirimkan daftar nama serta daftar pertanyaan-pertanyaan untuk melengkapi data persyaratan penerima Bantuan Langsung Tunai dan tahapan selanjutnya yaitu proses pembagian kompensasi(Jumarianta & Harun, 2023)

b.Bantuan Dana Sosial

1. Pengertian Bantuan Dana Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang dan jasa kepada keluarga atau seseorang yang dikatakan miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial. Dengan demikian pemerintah mengambil langkah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi keluarga untuk membantu masyarakat tersebut, bantuan sosial dilakukan melalui program-program yang

telah disusun oleh pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan dana sosial sebagai upaya meringankan permasalahan kemiskinan salah satu masalah pokok yang harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meningkatkan taraf hidup menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Hal ini harus terus didukung seiring perkembangan dan daya saing pada era globalisasi saat ini. Kondisi kehidupan masyarakat khususnya pada bidang ekonomi belumlah memadai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas SDM yang masih rendah dan infrastruktur yang belum memadai. Peningkatan ekonomi merupakan proses perekonomian yang berkesinambungan menjadi lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional. Simon Kuznets menyebutkan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yaitu bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output produksi ekonom seiring dengan penyesuaian ideologi. (Noerkaisar, 2021)

Bantuan sosial juga di atur dalam UU No 39 Tahun 2012 Tentang pedoman hibah bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjelaskan dana bantuan sosial merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 81/PMK.05/2012 Tentang belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan belanja

bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri adalah salah satu lembaga yang terorganisasi dari pelayan-pelayan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memadai dan relasi relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Tujuan kesejahteraan sosial dicapai melalui teknik dan metode-metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan juga sosial. Sumarwan menyatakan bahwa pendapatan perkapita dan belanja pangan keluarga akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah keluarga. Jumlah dan pola konsumsi suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. Keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar akan mengkonsumsi pangan dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggota keluarganya lebih sedikit. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayan-pelayanan tersebut

diatas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi kesejahteraan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

- a. Fungsi pencegahan (preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalahmasalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan di tekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial di tujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi penunjang (Supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan-

kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Menurut Bagus (2020:6) Maka dari itu, tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan Dana Bansos tersebut adalah untuk meringankan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan.

Semenjak adanya Covid muncul di Indonesia sangat banyak para pekerja yang di PHK atau dipecat dan akan menambah jumlah masyarakat kurang mampu di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus agar meringankan masyarakat yang kurang mampu.

Dikutip dari *website google* resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Pertama, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37.400.000.000.000,- . Kedua, Pemberian Kartu Sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan tersebut sebesar Rp. 200.000,- perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5.600.000,- orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000,- selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif

listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000,- dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

2 Jenis Bantuan Dana Sosial

Jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Adapun jenis-jenis Bantuan Sosial sebagai berikut:

- 1) Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat prasejahtera yang diberikan berbasis lembaga (panti dan KUBE).
- 2) Kedua, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana kas untuk biaya hidup.
- 3) Ketiga, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami hilangnya mata pencaharian karena bencana alam

- 4) Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban pengusuran.(Yunika & Shella, 2021)

3. Syarat Penerima Bantuan Sosial

Mengingat peran dan fungsi DTKS selaku rujukan utama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran bantuan sosial(Yunika & Shella, 2021)

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dari pasal 24 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang pedoman hibah bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

- 1) Kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :
 - a) Memiliki identitas yang jelas.
 - b) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.

- 3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran ; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat berkelanjutan, artinya bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, yang meliputi :
 - a) Rehabilitas sosial
 - b) Perlindungan sosial
 - c) Pemberdayaan sosial
 - d) Jaminan sosial
 - e) Penanggulangan kemiskinan
 - f) Penanggulangan bencana

4. Tujuan Bantuan Sosial

Adapun tujuannya bantuan sosial untuk mengetahui jumlah warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial di setiap lingkungan. Selanjutnya, data tersebut dimusyawarakan khusus oleh desa dalam rapat khusus, yaitu untuk validasi dan finalisasi data. Dokumen hasil pendataan lalu disahkan dengan tandatangan Kepala Desa. Setelah ditandatangani secara legal dan diverifikasi oleh desa, Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan setelah itu dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan(Adiprakoso & Yuliati, 2022).

Jangka Secara khusus, tujuan Bantuan Sosial terdiri atas :

- 1) Rehabilitas sosial yang sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial merupakan suatu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) Penanggulangan kemiskinan merupakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencahariaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.(Indrajaya & Ardha, 2022)

5. Manfaat Bantuan Sosial

Bantuan Sosial memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya ekonomi finansial

yang tidak terpenuhi akibat dari permasalahan ekonomi si penerima bantuan dana sosial maka dari bantuan sosial ini sangat bermanfaat bagi keluarga yang kurang mampu. Kecukupan Kebijakan program Bantuan Sosial di Masyarakat dalam mengatasi perekonomian masyarakat sudah dapat meringankan beban, masyarakat dan program ini telah mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima karena membantu mereka dalam meringankan kebutuhan pokoknya. Begitu pula, dengan adanya respon yang baik dari masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut sudah berhasil dalam mencapai tujuannya (Astari, 2021).

Pemerintah pusat sudah memberikan banyak bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt. Kemudian, pemerintah memberikan stimulus bagi pengusaha kecil dan menengah. Ia sudah memberikan stimulus lewat perbankan. (Indrajaya & Ardha, 2022)

Kemudian, pemerintah meluncurkan bansos produktif untuk 13 juta UMKM. Pemerintah kemudian memberikan bantuan lewat kartu prakerja untuk 10 orang pegawai di-PHK lewat program kartu Prakerja. Kemudian modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja di luar program Prakerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13. Serta banyak lagi bantuan-bantuan yang telah diberikan. Pemberian bantuan dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat
2. Mendorong konsumsi masyarakat
3. Menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia
4. Mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) (Astari, 2021)

5. Manfaat Pemberian Bantuan Sosial

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membeberkan 50% penerima manfaat subsidi listrik adalah pelanggan rumah tangga yang termasuk golongan mampu. Bahkan yang menjadi miris adalah kenyataan bahwa masyarakat prasejahtera dan rentan yang masuk dalam kelompok 40% ekonomi terbawah hanya 26% diantaranya menerima subsidi listrik. Selain itu permasalahan lain yang terjadi pada jenis bansos subsidi listrik yakni banyaknya masyarakat yang tidak berhasil menggunakan subsidi ini disebabkan kesalahan saat memasukan format ID Pelanggan yang tertera di meteran. Kurangnya sosialisasi terkait cara pendaftaran dan penggunaan berdampak pada ketidakefektifan bantuan subsidi listrik (Abbas, 2020). Adapun manfaat pemberian bantuan sosial sebagai berikut;

- a) **Rehabilitasi Sosial**, Bansos bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b) **Perlindungan Sosial**, Tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,

kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c) **Pemberdayaan Sosial**, Bansos juga bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d) **Jaminan Sosial**, Bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e) **Penanggulangan Kemiskinan**, Tujuan bansos sebagai penanggulangan kemiskinan memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f) **Penanggulangan Bencana**, Pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

6. Dampak Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diberikan dan disalurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat miskin di Indonesia sangat beragam jenisnya, mulai dari bantuan sosial berupa sembako, hingga bantuan sosial berupa uang tunai. Dari bantuan sosial yang diberikan pasti terdapat dampak yang ditimbulkan baik dampak positif

maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya bantuan sosial yaitu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, membantu meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan membantu masyarakat miskin untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hasil bantuan sosial secara maksimal sehingga mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya bantuan sosial adalah masyarakat merasa bergantung dengan bantuan sosial, merasa kehidupannya terbantu masyarakat hanya mengandalkan dari bantuan sosial yang disalurkan, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengubah perekonomian menjadi lebih baik, dan masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan bantuan sosial yang diberikan, terutama bantuan sosial tunai (Noerkaisar, 2021).

Dampak bantuan sosial ini berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, dari adanya program bantuan sosial pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, namun tidak menghapuskan masalah kemiskinan di Indonesia hanya saja mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan. Penyaluran bantuan sosial masih belum memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, dimana masyarakat hanya diberikan bantuan tetapi belum diberikan pemahaman mengenai manfaat yang dihasilkan dari bantuan tersebut. Masyarakat juga belum mempunyai kesadaran pentingnya melaporkan data diri sehingga masih terjadi data ganda di desa (Noerkaisar, 2021)

8. Indikator Bantuan Dana Sosial

Bantuan sosial dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program atau kegiatan untuk mencapai sasaran/target yang ingin dicapai, ketepatan sasaran sangat mendukung pelaksanaan sebuah program.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program BST dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat penerima program BST.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Tujuan dari program BST ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi covid-19.

9. Penyaluran dana bantuan sosial

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Hal serupa juga dikemukakan

oleh H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu.¹² Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau melalui sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output) (Maharsani, 2022).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut. Selain itu efektivitas merujuk pada kaitan antara hasil yang telah dicapai, sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.(Puryanti et al., 2022)

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan sudah efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas.

- a) Pendekatan Sumber Pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dari sebuah input. Pendekatan ini juga mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.
- b) Pendekatan Proses Pendekatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua rangkaian kegiatan baik itu proses internal ataupun mekanisme organisasinya.
- c) Pendekatan Sasaran Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah output atau hasil dari program telah sesuai dengan rencana atau tidak. (Puryanti et al., 2022)

c. Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. Pengertian penyaluran dana Desa

Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setyowati, 2019).

Kewajiban desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa adalah:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 mekanisme Penggunaan Data Terpadu program Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman umum Validasi dan Verifikasi Data terpadu Peoangan Fakir Miskin, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Jeneponto.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.(Adiprakoso & Yuliati, 2022)

Maka dari itu transparasi data dan pelayanan secara digital sangat dibutuhkan bagi masyarakat, diharuskan adanya suatu sistem Informasi yang mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan serta aduan dan memudahkan petugas dalam melakukan monitoring data penerima bantuan sosial.(Astari, 2021)

Sistem Informasi Bantuan Sosial yang di Singkat SIBOS merupakan produk dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk pengelolaan, penyempurnaan serta pemutakhiran data Bantuan Sosial yang ada di Kabupaten Jenepono secara sistematis dan dapat di akses oleh masyarakat.(Astari, 2021)

2. Pengertian Masyarakat

Pengertian Masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya.Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.(Margayaningsih, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- 2) Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;

- 3) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
- 4) Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Mayor Polak dalam Sosiologi mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai hubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan itu adalah hubungan sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.

Pandangan-pandangan di atas memperlihatkan dengan jelas apa yang menjadi kesamaan unsur-unsur masyarakat secara hakiki. Koentjaraningrat menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur masyarakat, yaitu: berhubungan dengan kategori sosial, golongan sosial, kelompok dan perkumpulan (Syamsudin, 2022).

3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. (Studies & Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan dipandang sebagai keadaan yang lebih baik. Pengertian dari kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. (Rahmah et al., 2021)

Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana setiap individu dalam kehidupannya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga kehidupannya akan terasa aman dan tentram, baik lahir maupun batin. (Adi Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berpengaruh dengan tinggi rendahnya uang yang dimiliki masyarakat.

Menurut Keynes dalam (Mutiara, 2010) apabila jumlah upah nominal masyarakat meningkat maka kondisi masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, yang dimaksud dengan keluarga sejahtera ialah keluarga yang pembentukannya berdasarkan atas perkawinan yang sah, bisa mencukupi kebutuhan hidup spiritual dan material dengan layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (BKKBN, 2019)(Oktriawan et al., 2021).

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat Dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak, Adapun indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, karena pendapatan berpengaruh terhadap daya beli konsumsi.¹⁵ Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

2) Pola Konsumsi

Konsumsi merupakan seluruh pembelian barang dan jasa akhir.¹⁶ Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

3) Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 2 ayat 1 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁷ Merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan tingkat pendidikan yang dicapai seseorang akan dapat menentukan bagaimana seseorang memperoleh pekerjaan dengan imbalan yang tinggi. relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan begitu, keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak akan bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan. Seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu

memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak (Safitri & Pradana, 2023).

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan bisa diartikan sebagai persamaan makna dari konsep martabat manusia yang diwujudkan dalam empat indikator diantaranya: (1) kesejahteraan (welfare)), (2), Rasa aman (security (3), jati diri (identity) dan (4) kebebasan (freedom). Indikator atau ukuran kesejahteraan tersebut yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dimana mana terciptanya kesejahteraan, rasa aman, jati diri dan kebebasan seseorang dalam mencukupi kebutuhannya.

Dalam mengukur tercapai tidaknya pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator kesejahteraan rakyat terdiri dari indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Oktriawan et al., 2021)

5. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al- Qur'an (Studies & Sukmasari, 2020).

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini (Sugita et al., 2020).

Kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan telah dijamin oleh Tuhan. Memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas, namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah umat manusia bukanlah sedikit tetapi dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan. (Studies & Sukmasari, 2020)

6. Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah

satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. (Jehosua, 2022)

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. (Jehosua, 2022)

Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

a) Program Indonesia Pintar:

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin

Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,

Bantuan yang diberikan:Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD
Rp750 ribu /tahun untuk anak SMP
Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

b) Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :

Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.

Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen

c) Program Keluarga Harapan:

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan kanak-ankaknya. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018. Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

d) Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai:

Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya. (Paat et al., 2021)

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan evaluasi. Maka dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan hasil penelitian tersebut:

a. Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati et.al.,2020). Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, misal terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia.(Dewi & Andrianus, 2021)

b. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung

Pada kajian penelitian pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Bandung ini penulis lebih memfokuskan pada program yang telah dijalankan oleh dinas sosial yang bernama program bantuan sosial BST atau Bantuan Sosial Tunai dengan perolehan data yang mengacu pada indikator pengelolaan dana bantuan sosial tersebut yang didalamnya meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengawasan, Efektivitas(Nainah et al., 2022).

c. Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)

Hambatan dalam penentuan karakteristik informan dalam mendukung penulisan ini didapati beberapa kendala, antara lain: a) Keterbatasan jumlah penerima manfaat yang direkomendasikan oleh Kelurahan mengingat sebgaiian besar masyarakat di Kelurahan Sikumana bermata pencaharian petani dan wirausaha sehingga penulis kesulitan untuk mengatur waktu wawancara; b) Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan mengakibatkan terjadinya pendobelan data dan membutuhkan waktu untuk dilakukan verifikasi lanjutan; dan c) Keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan penulis untuk dapat menggali lebih jauh terkait permasalahan dan pemecahan dalam penelitian.

C.Kerangka Berfikir

Dalam peraturan presiden (PERPRES) No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. bahwa penyaluran bantuan

sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

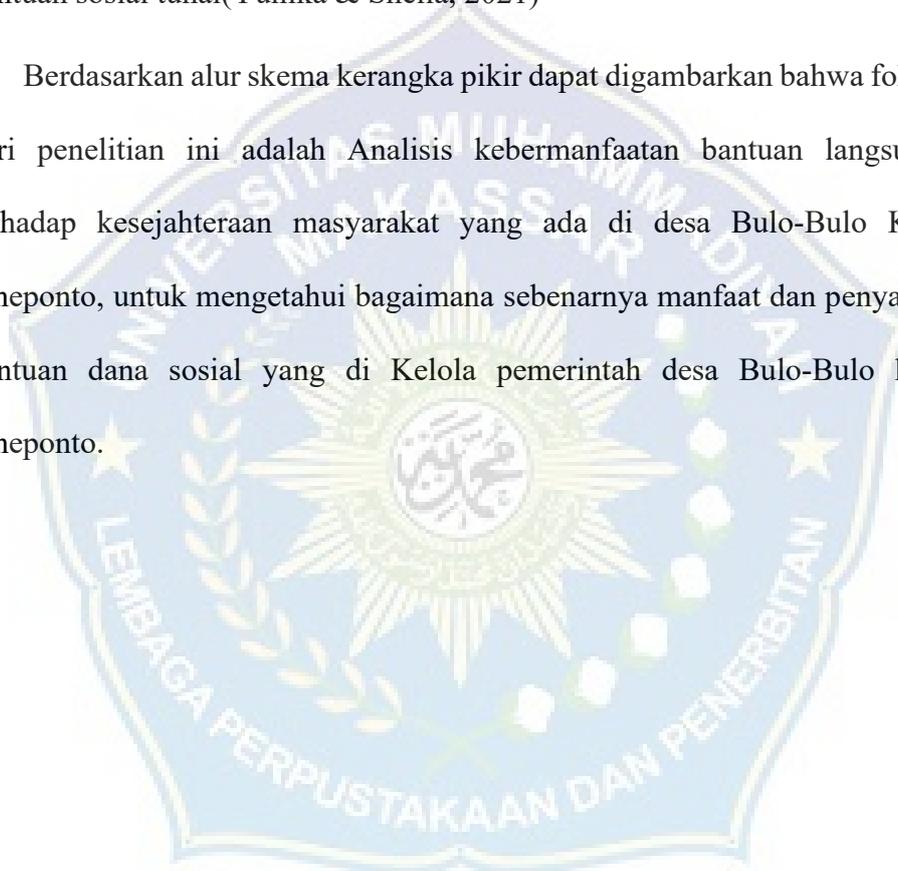
Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

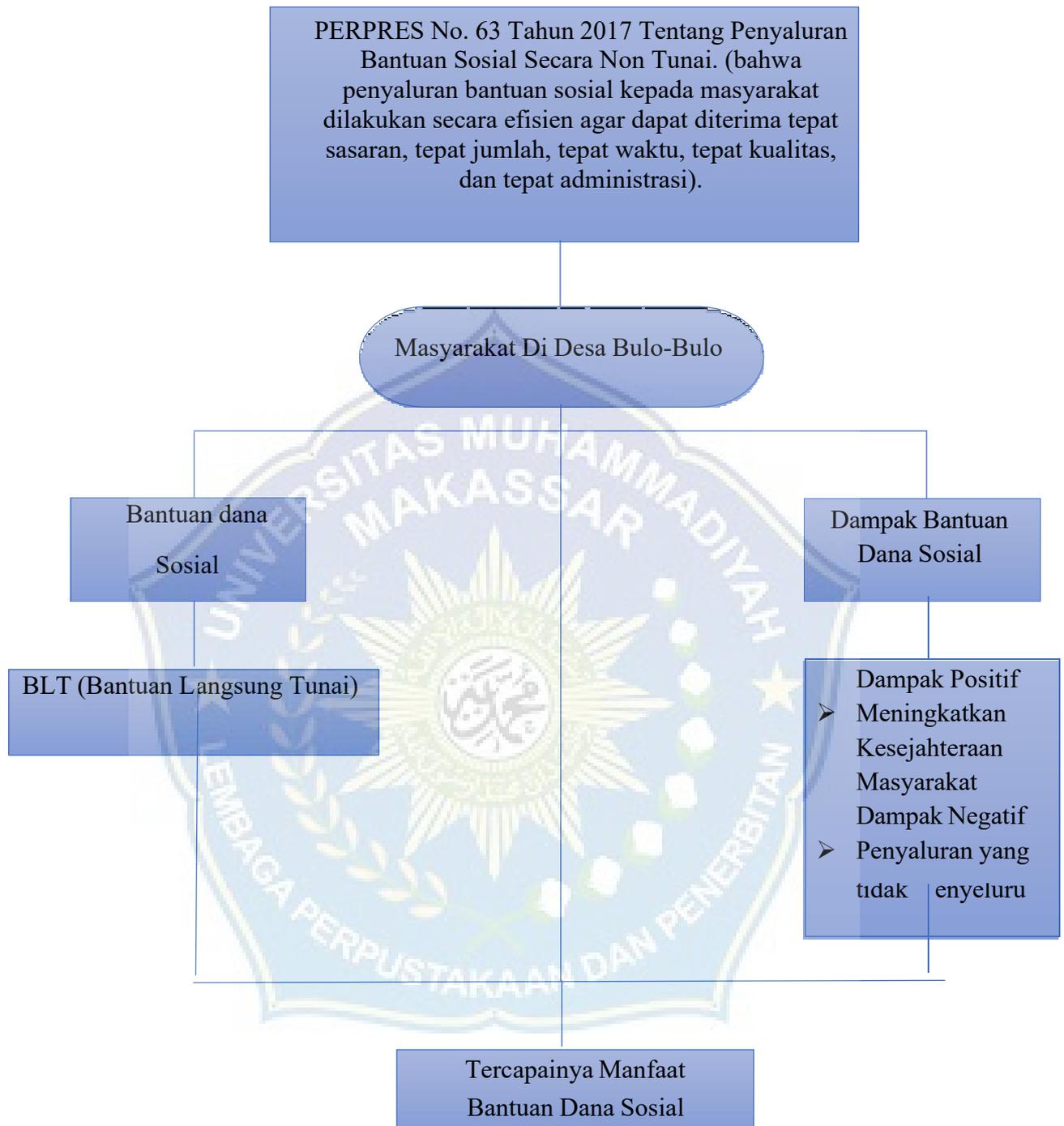
1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial yang diberikan dan disalurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat miskin di Indonesia sangat beragam jenisnya, mulai dari bantuan sosial berupa sembako, hingga bantuan sosial berupa uang tunai. Dari bantuan sosial yang diberikan pasti terdapat dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya bantuan sosial yaitu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, membantu meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan membantu masyarakat miskin untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hasil bantuan sosial secara maksimal sehingga mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya bantuan sosial adalah masyarakat merasa

bergantung dengan bantuan sosial, merasa kehidupannya terbantu masyarakat hanya mengandalkan dari bantuan sosial yang disalurkan, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengubah perekonomian menjadi lebih baik, dan masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan bantuan sosial yang diberikan, terutama bantuan sosial tunai (Yunika & Shella, 2021)

Berdasarkan alur skema kerangka pikir dapat digambarkan bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah Analisis kebermanfaatan bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya manfaat dan penyaluran dari bantuan dana sosial yang di Kelola pemerintah desa Bulu-Bulu kabupaten Jeneponto.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Adawiyah et al., 2023). Penelitian kualitatif didasarkan pada konteks alamiah secara keseluruhan, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, mengutamakan proses dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan, dan diakui oleh penulis penelitian dan peneliti menyepakati topik penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jenepono.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung

C. Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Menurut Sugiono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengepul data. Dalam penulisan ini diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru PPKn yang berada di lingkungan sekolah (Panggalo et al., 2021).

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian (Panggalo et al., 2021)

D. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Salmaa, 2023). Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian. Jika fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan Instrumen yang digunakan pada penelitian, dan di harapkan dapat melengkapi data. Instrumen yang

digunakan adalah pedoman dalam melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang digunakan antara lain:

1. Lembar observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. kunsuner

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, Angket, dokumentasi,) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

1. Lembar observasi

Lembar observasi di gunakan dalam penelitian ini untuk mengalih data mengenai bagaimana sistem penyaluran bantuan tunai langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bulo-Bulo kabupaten Jeneponto

2. konsuner

Konsuner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai serta untuk mengetahui tantangan dan hambatan apakah penyaluran bantuan langsung itu sudah sesuai dengan aturan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa Dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,

wawancara, intisari dokumen, pitarekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti teori Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam (Anridzo, Arifin, & Wiyono) dengan tiga langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar teorioleh Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif (Di & Dasar, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan, berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Kondensasi Data

kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan atau mentransformasikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Makna dari kondensasi mengacu pada penguatan data. Dalam model sebelumnya menggunakan istilah reduksi yang berarti mengurangi data. Sedangkan dalam kondensasi data tidak dihilangkan melainkan dirangkum, diparafrase, maupun digabungkan dengan data lainnya. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui merangkum hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan

masing–masing aspek ringkasan informasi yang kemudian dipakai sebagai data penelitian (Herviani et al., 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang terkumpul kemudian diverifikasi terus menerus selama proses penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga kesimpulan terakhir dapat dipertanggung jawabkan.

G. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri peneliti, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti. Namun demikian, sebagai manusia, seorang peneliti sulit terhindar dari bias atau subjektivitas. Karena itu, tugas peneliti mengurangi semaksimal mungkin bias yang terjadi agar diperoleh kebenaran utuh. Pada titik ini para penganut kaum positivis meragukan tingkat ke'ilmiah'an penelitian kualitatif. Malah ada yang secara ekstrim menganggap penelitian kualitatif tidak ilmiah.

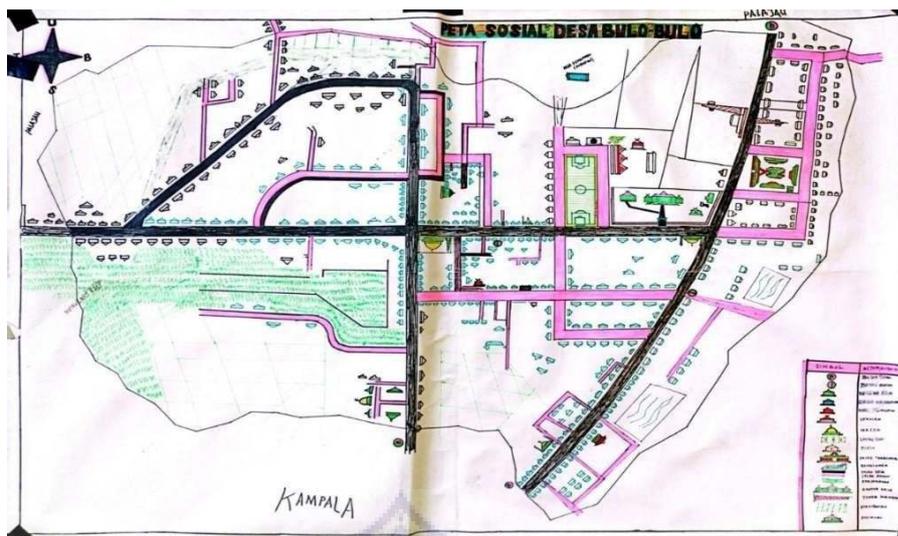
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bulo-Bulo, Kec Arungkeke Kab Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan, PROVINSI SULAWESI SELATAN, yang bertempat di kantor Desa Bulo-Bulo, Jumlah penerima bantuan langsung tunai sebanyak 52 orang, Ruang pelayanan desa, Ruang lapas desa dan Ruang kepala desa, adapun luas tanahnya sebesar 2000 m², Jumlah pemukiman dan pembangunan yang ada di desa sebanyak 18 pemukiman dan pembangunan Yakni (Tempat Ibadah, Jalan Desa, Pasar Desa, Sekolah, Posyandu/polindes/taman baca, Kantor BPD, Lapangan olahraga, Pemukiman, koperasi rahmat manningi, koperasi wanita, tanah kuburan, sawah irigrasi, sawah tadah hujan, lahan tambak, lahan perkebunan, dan pantai produktif. Adapun jumlah staf yang ada di Kantor Desa Bulo-Bulo Kab. Jeneponto adalah sebanyak 56 staf.

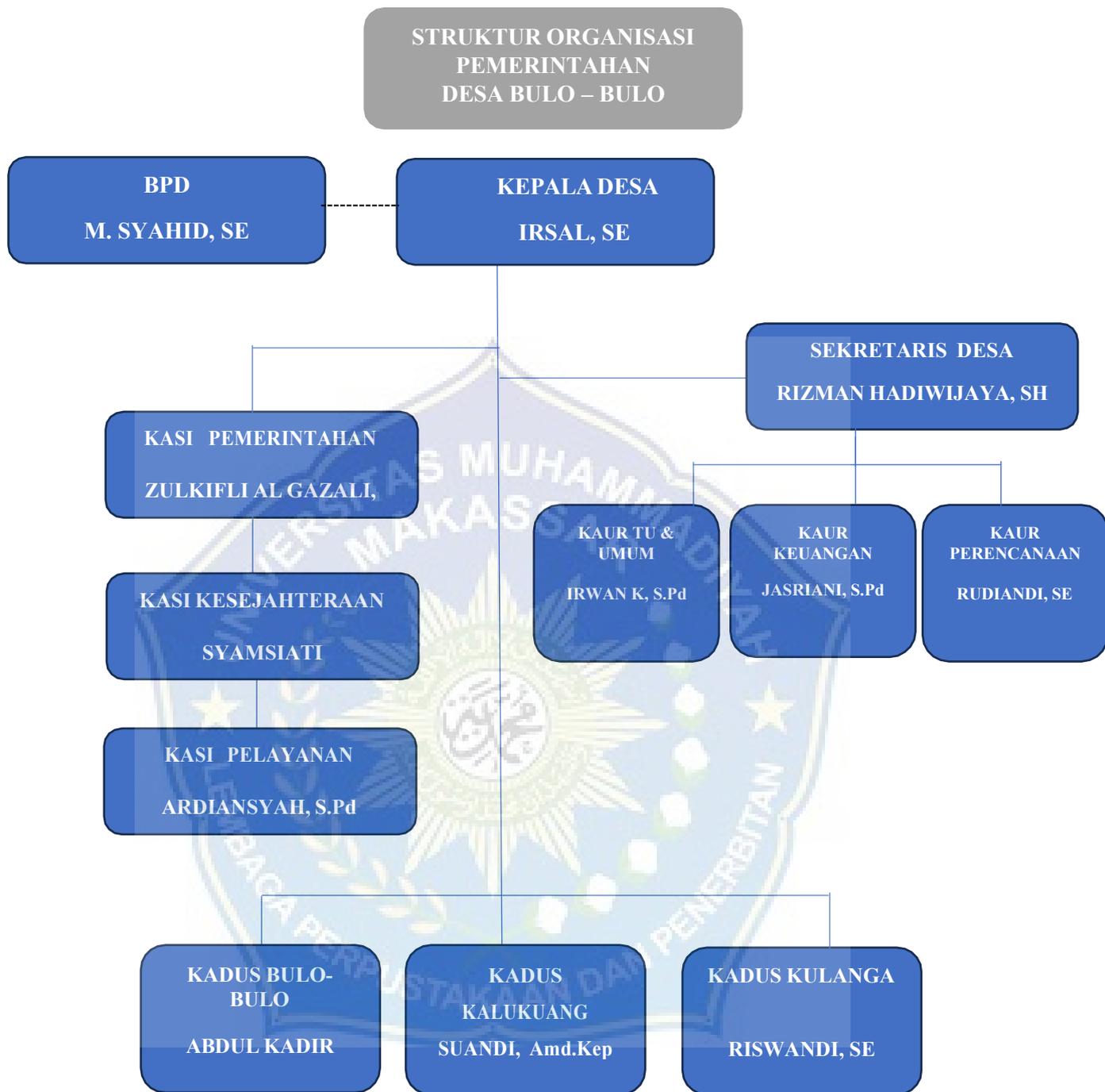
Desa Bulo-bulo merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Desa Bulo-bulo sebesar 358 Ha. Desa Bulo-bulo terdiri dari 3 Dusun dan 6 RK atau Rukun Keluarga. Desa Bulo-bulo terletak di sebelah selatan Ibukota Kabupaten Jeneponto dengan jarak 7.13 km.



Desa Bulo – Bulo merupakan Desa yang memiliki kondisi wiayah dataran rendah dari luas sawah 180, 20 Ha, luas kebun 72 Ha, luas perumahan 26,40 Ha, luas empang 8,70 Ha, luas tanah tadah hujan 70 Ha, dan fasilitas umum 4,40 Ha, dan luas pantai 1, 625 Ha, Sehingga untuk lancarnya roda pemerintahan maka Desa Bulo – Bulo telah dibagi menjadi tiga Dusun wilayah pengembangan budidaya pertanian terdiri dari padi, jagung, dan budidaya kelautan terdiri dari perikan dan rumput laut.

Berdasarkan hasil pendataan penduduk tahun 2024 yang dilakukan oleh Aparat Desa dan Gabungan Kader Desa Bulo – Bulo, tercatat jumlah KK Kaya sebanyak 147 KK, KK Sedang sebanyak 194 KK, KK miskin sebanyak 161 KK, dan KK sangat Miskin sebanyak 217 KK. Penentuan tingkat kesejahteraan ini berdasarkan 12 aspek indikator tingkat kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat sendiri . adapun jenis prasarana dan sarana desa pada tabel berikut;

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Tempat	Jumlah
1	Kantor Desa	Dusun Bulo-bulo	1
2	Gedung MA	Dusun Kulanga	1
3	Gedung Tsanawiah	Dusun Kulanga	1
4	Gedung SD	Bulo-bulo & Kulanga	2
5	Gedung TK	Bulo-bulo, Kulanga & Kalukuang	3
6	Masjid	Bulo-bulo & Kulanga	2
7	Musholla	Bulo-bulo & Kulanga	2
8	Pasar Desa	Dusun Bulo-bulo	1
9	Posyandu	Dusun Bulo-bulo	1
10	Kantor BPD	Dusun Bulo-bulo	1
11	Sekretariat Karangtaruna	Dusun Bulo-bulo	1
12	Sekretariat PKK	Dusun Bulo-bulo	1
13	Jembatan	Kulanga	1
14	Jalan Desa	Desa Bulo-bulo	5,87 Km
15	Jalan Setapak	Bulo-bulo, Kulanga & Kalukuang	
16	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dusun Bulo-bulo	1
17	Pusat Olahraga	Dusun Bulo-bulo	1



1. Visi dan Misi Desa Bulo-Bulo

a. Visi

Terwujudnya Bulo-Bulo Maju (Mandiri,Sejahtera,Unggul) Melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih (Good Governance).

b. Misi

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Maju

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pemenuhan kesejahteraan dan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menghadirkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik dengan prinsip. Akuntabilitas (keterbukaan dan tanggung jawab), aspiratif (mendengarkan aspirasi), ldan partisipatif (ketikutsertaan masyarakat)
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan tanggap, cerdas, santun, dan rama berbasis teknologi informasi

➤ Bidang pembangunan desa maju

1. Membangun Desa Maju melalui penyusunan tata Kelola perencanaan pembangunan desa seperti pemetaan wilayah pertanian,perikanan dan pemukiman.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penguatan peran dan fungsi kelompok tani serta

pengembangan sumber daya dan fasilitas pertanian dan perikanan.

3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat melalui penyediaan fasilitas kebersihan dan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

➤ Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Maju

1. Membangun sumber daya manusia (SDM) Bulo-Bulo yang unggul dan religius melalui peningkatan kualitas Pendidikan formal maupun non formal serta penguatan Pendidikan dan kehidupan beragama
2. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat
3. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong.

➤ Bidang pemberdayaan masyarakat Desa maju

1. Mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi bumdes
2. Mengembangkan Minat dan bakat generasi muda Bulo-Bulo melalui pengoptimalan peran dan fungsi karang taruna bamboo hijau

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Penyaluran Bantuan Langsung Tunai didesa Bulu-Bulu kabupaten Jeneponto

Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti terkait dengan system penyaluran Dana bantuan langsung tunai ada beberapa tata cara untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai berikut adalah cara masyarakat mencairkan dana BLT

1. Membawa surat undangan pencairan (undangan pencairan diberikan pemerintah desa)
2. Membawa KTP, dan KK ke kantor pos terdekat.
3. Datang ke kantor sesuai jadwal undangan.
4. Ambil nomor antrean
5. Kemudian menerima uang dan TTD

Tata cara diatas pun sangat sederhana Adapun besaran yang diterima penerima BLT adalah **Rp300.000 per bulan** dan dibayarkan selama periode 2 bulan. Artinya masyarakat yang menjadi penerima manfaat akan mendapatkan total sebesar Rp 600.000 dana bansos setiap 2 bulan sekali.namun ada Sebagian masyarakat yang mengeluh atas waktu pencairan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah desa karna bisa dibilang cukup lama.Berikut adalah nama-nama penerima BLT dan jumlah bantuannya ;

Nama-Nama Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan yang diberikan
MAPPI	BLT	Rp.300.000/perbulan
ABIDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan
MASSALISI	BLT	Rp.300.000/perbulan
NAHARIA DG BAU	BLT	Rp.300.000/perbulan
RABASIA	BLT	Rp.300.000/perbulan
KAMUMMU	BLT	Rp.300.000/perbulan
JAMALUDDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan
MAWANG	BLT	Rp.300.000/perbulan
NORO DG SANNANG	BLT	Rp.300.000/perbulan
NASARUDDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan
SUNGGUH	BLT	Rp.300.000/perbulan
SIRAJUDDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan
HANI	BLT	Rp.300.000/perbulan
KADE	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAINUDDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan
LILI	BLT	Rp.300.000/perbulan
SYAMSINAR	BLT	Rp.300.000/perbulan

MUHAMMAD DG GAPP	BLT	Rp.300.000/perbulan
YATI	BLT	Rp.300.000/perbulan
ARDI	BLT	Rp.300.000/perbulan
KARTINI	BLT	Rp.300.000/perbulan
HARIATI	BLT	Rp.300.000/perbulan
MATTAUNG DG BELLA	BLT	Rp.300.000/perbulan
RUKIAH	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAHRIANAH	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAMSI AH DG ROMBA	BLT	Rp.300.000/perbulan
CAYA	BLT	Rp.300.000/perbulan
NURIDA	BLT	Rp.300.000/perbulan
MO'MING	BLT	Rp.300.000/perbulan
SABBARA	BLT	Rp.300.000/perbulan
RAMLAHWATI DG TE'NE	BLT	Rp.300.000/perbulan
HAJRAH	BLT	Rp.300.000/perbulan
BA'DO DG RATE	BLT	Rp.300.000/perbulan
INDRAWATI	BLT	Rp.300.000/perbulan

SINASAI	BLT	Rp.300.000/perbulan
SOFYAN	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAWIA	BLT	Rp.300.000/perbulan
RIDWAN	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAMSUL BAHRI	BLT	Rp.300.000/perbulan
SUPIATI	BLT	Rp.300.000/perbulan
KASMIATI	BLT	Rp.300.000/perbulan
NIA	BLT	Rp.300.000/perbulan
LENTENG	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAENAB	BLT	Rp.300.000/perbulan
PAGULING	BLT	Rp.300.000/perbulan
SAINTANG	BLT	Rp.300.000/perbulan
MASSANIGA	BLT	Rp.300.000/perbulan
MUSTARI DG NGONDANG	BLT	Rp.300.000/perbulan
TANAHARI	BLT	Rp.300.000/perbulan
YUDDIN	BLT	Rp.300.000/perbulan

Adapun Nama-nama diatas adalah masyarakat yang menerima dana bantuan Langsung tunai dimana 52 masyarakat yang menerima bantuan tersebut memiliki banyak Kebijakan.bantuan besaran yang diterima penerima BLT sebesar **Rp300.000 per bulan** dan dibayarkan selama

periode 2 bulan. Artinya masyarakat yang menjadi penerima manfaat akan mendapatkan total sebesar Rp 600.000 dana bansos setiap 2 bulan sekali. Namun ada sebagian masyarakat yang mengeluh atas waktu pencairan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah desa karena bisa dibilang cukup lama bantuan langsung tunai juga telah memberikan banyak peluang untuk masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan.

Dalam proses kesejahteraan masyarakat dimana dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai yang diberikan oleh desa kepada masyarakat yang kurang mampu atau termasuk kriteria BLT. Dalam aspek bantuan langsung tunai sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Pemanfaatan bantuan langsung tunai sebelumnya bukan hal yang baru di Desa Bulu-Bulu, Meskipun banyak bantuan dana sosial di desa Bulu-Bulu penyaluran bantuan dana sosial berbasis tunai mulai sering digunakan pada tahun 2005, pada saat proses penyaluran dana bantuan sosial di desa Bulu-bulu sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu sejak adanya bantuan langsung tunai sejak tahun 2005, meskipun pada tahun itu desa Bulu-Bulu memiliki banyak bantuan dana sosial akan tetapi dana bantuan yang berdampak yang diberikan adalah bantuan langsung tunai, tapi semenjak tahun 2005 akhir hingga sekarang hampir 80% proses penyaluran dana bantuan langsung tunai tersalurkan, untuk memudahkan proses penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan pendata

oleh pelayanan desa kemudian sekretaris desa melakukan validasi data yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT pada masyarakat yang kurang mampu, seperti yang kita ketahui penerima dana bantuan langsung tunai merupakan kriteria masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai.

Adapun kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai adalah tidak termasuk belum terdata DTKS seperti penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja, dan program bansos lain. bantuan langsung tunai ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang tidak memiliki penghasilan

2. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Selama proses penyaluran bantuan langsung tunai ini ada dampak tersendiri terhadap penerima bantuan langsung tunai. Adapun dampak positif dan negatifnya yaitu dampak positif adalah dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu menjadi terbantu sedangkan dampak negatifnya adalah masih banyak penyaluran yang tidak tepat sasaran. ada beberapa tata cara untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai berikut adalah cara masyarakat mencairkan dana BLT

1. Membawa surat undangan pencairan (undangan pencairan diberikan pemerintah desa)
2. Membawa KTP, dan KK ke kantor pos terdekat.
3. Datang ke kantor sesuai jadwal undangan.

4. Ambil nomor antrean
5. Kemudian menerima uang dan TTD

Tata cara diatas pun sangat sederhana sehingga masyarakat penerima BLT tertib untuk mencairkan dana tersebut.apabila masyarakat BLT tidak hadir maka pemerintah desa akan mengunjungi rumah masyarakat tersebut karna ada beberapa masyarakat yang sakit dan tidak mampu kekantor desa untuk mencairkan dana BLT tersebut sehingga pemerintah desa harus turun kelapangan untuk mendatangi satu satu rumah warga yang tidak sempat hadir pada saat penerimaan BLT.dana bantuan tersebut juga bisa di bilang sangat membantu masyarakat desa karna ada BLT dapat menompang kebutuhan pokok masyarakat ,terutama masyarakat menengah kebawah karna menurutnya di desa bulo-bulo penyalurannya sudah sangat tepat.

Apabila masyarakat penerima BLT merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk. Masih merujuk pada PMK di atas, jika Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan di Tahun Anggaran 2021, akan dikenakan sanksi. Sanksi itu berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50 persen dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. Pengenaan sanksi ini dikecualikan dalam hal berdasar hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.berikut adalah nama-nama dan pekerjaan penerima BLT di desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto;

Nama-Nama Penerima BLT	Pekerjaan
------------------------	-----------

MAPPI	PETANI
ABIDIN	PETANI
MASSALISI	PETANI
NAHARIA DG BAU	PETANI
RABASIA	PETANI
KAMUMMU	PETANI
JAMALUDDIN	PETANI
MAWANG	PETANI
NORO DG SANNANG	PETANI
NASARUDDIN	PETANI
SUNGGUH	-
SIRAJUDDIN	PETANI
HANI	PETANI
KADE	PETANI
SAINUDDIN	PETANI
LILI	PETANI
SYAMSINAR	PETANI
MUHAMMAD DG GAPP	PETANI
YATI	PETANI
ARDI	PETANI
KARTINI	PETANI
HARIATI	PETANI

MATTAUNG DG BELLA	PETANI
RUKIAH	PETANI
SAHRIANAH	PETANI
SAMSI AH DG ROMBA	PETANI
CAYA	PETANI
NURIDA	PETANI
MO'MING	PETANI
SABBARA	PETANI
RAMLAHWATI DG TE'NE	PETANI
HAJRAH	PETANI
BA'DO DG RATE	PETANI
INDRAWATI	PETANI
SINASAI	PETANI
SOFYAN	PETANI
SAWIA	PETANI
RIDWAN	PETANI
SAMSUL BAHRI	PETANI
SUPIATI	PETANI
KASMIATI	PETANI
NIA	PETANI
LENTENG	PETANI
SAENAB	PETANI

PAGULING	PETANI
SAINTANG	PETANI
MASSANIGA	PETANI
MUSTARI DG NGONDANG	PETANI
TANAHARI	PETANI
YUDDIN	PETANI
MAWATI	PETANI
JUMALOE	PETANI

Sumber data kator desa bulo-bulo

Berdasarkan nama-nama yang ada di atas sebanyak 52 masyarakat penerima BLT di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto bisa kita simpulkan bahwa hampir keseluruhan penerima BLT itu pekerjaannya petani sehingga banyak masyarakat yang menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pertanian sehingga sudah sangat baik sekali dan Sudah sesuai dengan kriteria para penerimanya.

3. Cara Cek Penerima BLT Dana Desa (tepat sasaran)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi dampak kemiskinan terhadap masyarakat pedesaan. Inisiatif ini melibatkan pemberian bantuan tunai langsung kepada individu yang termasuk kriteria atau mereka yang menderita penyakit kronis di pedesaan, yang bersumber dari Dana Desa. Program ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program

bantuan sosial, dengan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan utama yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Verifikasi dan pengawasan oleh pendamping program memainkan peran penting dalam memastikan proses demokrasi selama pertemuan desa. Berikut adalah Langkah-langkah yang harus dilakukan

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan data wilayah penerima bantuan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
3. Masukkan nama penerima bantuan sesuai dengan identitas kartu tanda penduduk (KTP).
4. Situs akan meminta untuk memasukkan 8 kode huruf captcha pada kotak yang tersedia
5. Setelah itu, klik tombol "Cari Data".
6. Jika nama kalian muncul, maka kalian sudah terdaftar sebagai penerima BLT anak sekolah dan berhak mendapatkan bantuan.

Apabila nama-nama masyarakat Daftar penerima BLT Dana Desa akan muncul Daftar ini yang memuat sejumlah nama penerima BLT Dana Desa lengkap dengan alamatnya. Anda hanya perlu men-scroll atau menggulir daftar nama penerima BLT Dana Desa yang telah diurutkan sesuai abjad. sehingga sudah sangat baik sekali dan Sudah sesuai dengan kriteria para penerimanya.

Penmerintah desa juga memberikan bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima BLT dan

diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan adanya program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang kurang mampu tentunya memberikan efek positif bagi masyarakat penerima BLT. adapun hasil data konsuner yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Untuk system Penyaluran dana BLT

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1.	Setuju	32	61.5%
2.	Tidak Setuju	20	38.5%
	Total	52	100%

Nama-Nama Penerima BLT	Pekerjaan	Persentasi setuju/tidak setuju Untuk system Penyaluran dana BLT	
		Setuju	Tidak Setuju
MAPPI	PETANI	✓	
ABIDIN	PETANI	✓	
MASSALISI	PETANI		✓
NAHARIA DG BAU	PETANI	✓	
RABASIA	PETANI	✓	
KAMUMMU	PETANI		✓
JAMALUDDIN	PETANI		✓
MAWANG	PETANI	✓	
NORO DG SANNANG	PETANI		✓
NASARUDDIN	PETANI	✓	
SUNGGUH	PETANI	✓	
SIRAJUDDIN	PETANI	✓	
HANI	PETANI		✓
KADE	PETANI	✓	
SAINUDDIN	PETANI	✓	
LILI	PETANI	✓	

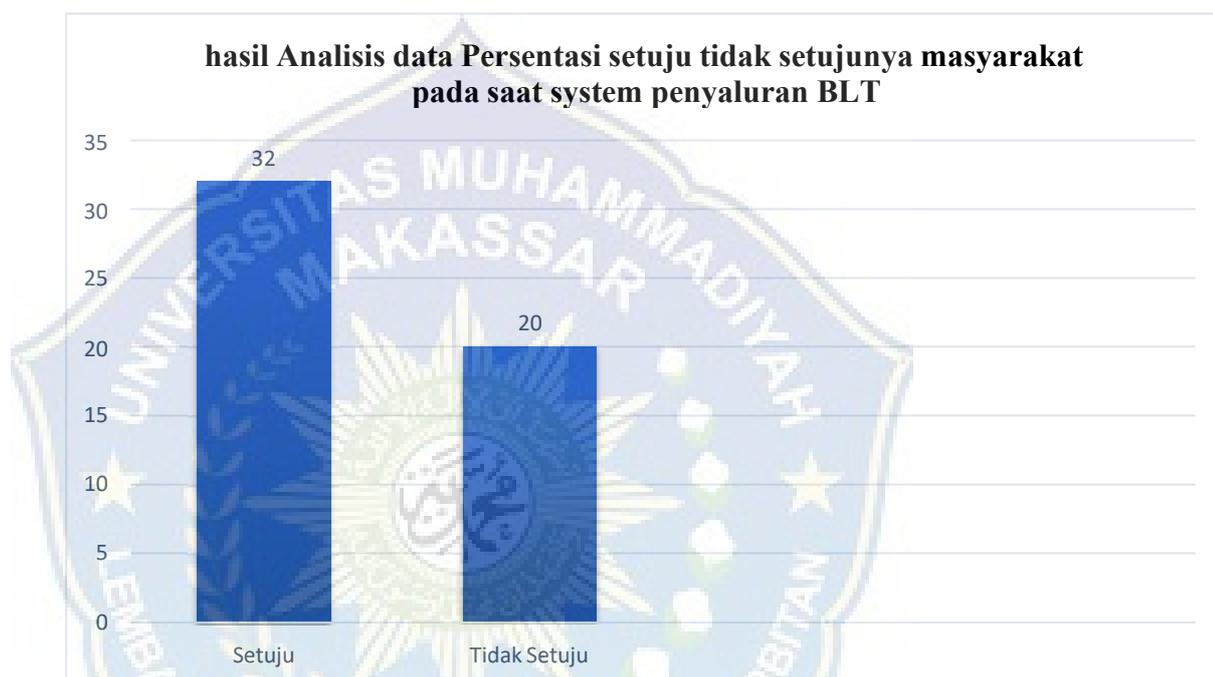
SYAMSINAR	PETANI		✓
MUHAMMAD DG GAPPA	PETANI		✓
YATI	PETANI	✓	
ARDI	PETANI		✓
KARTINI	PETANI	✓	
HARIATI	PETANI		✓
MATTAUNG DG BELLA	PETANI	✓	
RUKIAH	PETANI		✓
SAHRIANAH	PETANI	✓	
SAMSI AH DG ROMBA	PETANI		✓
CAYA	PETANI		✓
NURIDA	PETANI	✓	
MO'MING	PETANI		✓
SABBARA	PETANI	✓	
RAMLAHWATI DG TE'NE	PETANI	✓	
HAJRAH	PETANI		✓

BA'DO DG RATE	PETANI	✓	
INDRAWATI	PETANI	✓	
SINASAI	PETANI	✓	
SOFYAN	PETANI		✓
SAWIA	PETANI		✓
RIDWAN	PETANI	✓	
SAMSUL BAHRI	PETANI	✓	
SUPIATI	PETANI		✓
KASMIATI	PETANI	✓	
NIA	PETANI	✓	
LENTENG	PETANI		✓
SAENAB	PETANI	✓	
PAGULING	PETANI	✓	
SAINTANG	PETANI	✓	
MASSANIGA	PETANI	✓	
MUSTARI DG NGONDANG	PETANI		✓
TANAHARI	PETANI	✓	
YUDDIN	PETANI	✓	
MAWATI	PETANI		✓

JUMALOE	PETANI	✓	
JUMLAH		32	20

Sumber data kantor desa bulo-bulo

Diagram hasil Analisis data Persentasi setuju tidak setujunya masyarakat pada saat system penyaluran BLT:



Adapun hasil konsuner diatas yang peneliti lakukan pada masyarakat penerima BLT dan pemerintah desa,hasil data yang diterima peneliti sebanyak 20 masyarakat mengeluh karna jadwal yang tentukan pemerintah desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah desa,alasan pemerintah desa memperlambat dana bantuan tersebut karna adanya ketidak validtan data atau tidak kesusaian data yang di terima pemerintah desa yang membuat pemerintah desa mendata ulang masyarakat penerima BLT.dalam hal ini bantuan kesejahteraan masyarakat desa Bulo-Bulo dalam proses penyaluran dana BLT sebanyak 52 masyarakat yang

tergolong masuk di kriteria penerima BLT yang memiliki data valid, mereka merasakan bantuan langsung tunai sangat membantu masyarakat desa dimana mereka terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai sebagai penambah penghasilan masyarakat yang kurang mampu terlebih lagi hampir semua penerima BLT merupakan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan tidak tergolong sebagai penerima PKH dan dana bantuan lainnya.

Bantuan langsung tunai bisa dibilang sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 52 masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya BLT. sebanyak 52 masyarakat cukup mengantungkan dirinya kepada bantuan BLT untuk mencukupi kebutuhan harian mereka Adapun perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat penerima BLT sangat terbantu finansial mereka sebanyak 52 masyarakat sangat menyukai dana bantuan langsung tunai yang sedikit meringankan perekonomian masyarakat.

3. .Hambatan – Hambatan selama proses Penyaluran bantuan Langsung

Penelitian ini mendeskripsikan bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai didesa Bulu-Bulu belum merata kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat diukur melalui mekanisme pendataan yang tidak benar dalam menetapkan penerimaan BLT. serta banyak keluhan yang ditemukan dari keluarga yang kurang mampu yang tidak terdaftar di penerima BLT tersebut. keluhan tersebut. dari 52

masyarakat penerima BLT ternyata masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang system penyaluran BLT tersebut karna masyarakat merasa tidak cukup dengan dana BLT tersebut karna tidak mencukupi biaya hidupnya

Masyarakat penerima bantuan langsung tunai dan pemerintah desa di mengungkapkan beberapa hambatan dalam proses system penyaluran bantuan langsung tunai di desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto dimana hambatan tersebut.

1. Hambatan terhadap Data Yang Tidak Akurat

Selama proses pengimputan Data banyak data masyarakat yang menjadi kendala selama proses pendataan dan temuan duplikasi penerima bantuan ganda dikarenakan BPKP melakukan *cleansing* data terhadap penerima BLTDD dengan penerima bantuan lainnya. Misalnya, temuan tim di lapangan yang menemukan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tercatat meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Selain itu, banyak pemerintah desa mengeluh dengan data-data masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT hal ini menyebabkan pemerintah desa kewalahan dengan data data yang masuk sehingga pemerintah desa harus mendata ulang penerima dana bantuan langsung tunai

Selain ketidakakuratan data dan kurangnya informasi terkait bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di desa

Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto juga banyak menimbulkan konflik antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Hal ini juga mengakibatkan pemerintah desa susah mendata masyarakat yang kurang mampu.

2. Hambatan terhadap Pencairan Bantuan Langsung Tunai yang tidak sesuai

Proses pencairan BLT memang sangat lambat karena minimnya komunikasi pada masyarakat sehingga masyarakat banyak mengeluh tentang pencairan dana tersebut. Pemerintah desa juga memiliki banyak masalah pada saat mengurus proses pencairan BLT dimana dia disulit oleh data data masyarakat yang tidak valid.

Adapun jadwal pencairan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa

Selama proses pencairan dana bantuan langsung tunai yang tidak sesuai dengan jadwal yang di tentukan banyak masyarakat yang tidak tau tentang jadwal penerimaan bantuan langsung tunai itu karena miskomunikasi antara aparat desa dan desa selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluh dengan system pencairannya karena bisa di bilang cukup lama untuk mencairkan dana BLT. Pemerintah desa juga memiliki acuan untuk menganalisis data yang

pergantian atau pindah penduduk sehingga pemerintah desa dibuat mendata ulang penerima bantuan tersebut

3. Hambatan Terhadap Pertanggungjawaban BLT desa belum menggambarkan kondisi penyaluran BLT desa

Selama proses Permasalahan itu mengakibatkan hasil pendataan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan terdapat risiko salah sasaran dalam penyaluran BLT Desa Atas permasalahan itu, teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa. staf desa juga bingung dengan permasalahan kondisi penyaluran BLT karna data data yang masuk di kantor desa. berdasarkan gambaran kondisi BLT yang belum sesuai dengan kriteria penerima BLT hal ini menimbulkan pemerintah desa kewalahan untuk mendata ulang masyarakat di desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto.

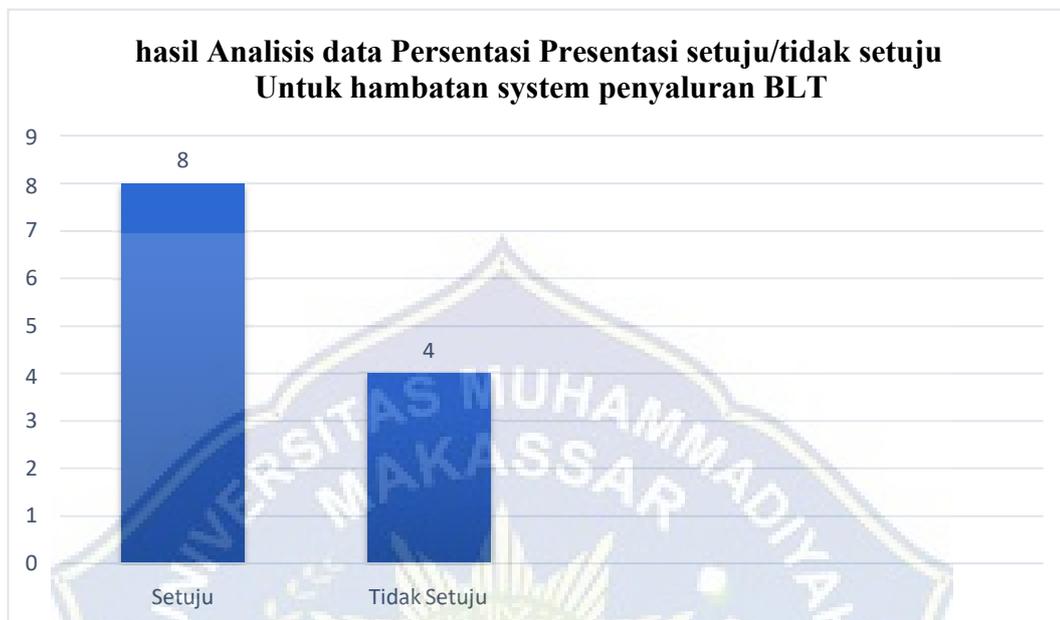
Adapun hasil presentasi penelitian terhadap hambatan yang dikelolah peneliti di desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut

Nama-Nama pemerintah desa Bulo-Bulo	Pengelolah	Presentasi setuju/tidak setuju Untuk hambatan system penyaluran BLT	
		Setuju	Tidak Setuju
IRSAL, SE	Kepala Desa	✓	

M. SYAHID, SE	BPD		✓
RIZMAN HADIWIJAYA, SH	SEKRETARIS DESA	✓	
IRWAN K, S.Pd	KAUR TU & UMUM	✓	
RUDIANDI, SE	KAUR PERENCANAAN	✓	
JASRIANI, S.Pd	KAUR KEUANGAN	✓	
ZULKIFLI AL GAZALI, S.IP	KASI PEMERINTAHAN		✓
SYAMSIATI	KASI KESEJAHTERAAN	✓	
ARDIANSYAH, S.Pd	KASI PELAYANAN	✓	
ABDUL KADIR	KADUS BULO- BULO		✓
SUANDI, Amd.Kep	KADUS KALUKUANG		✓
RISWANDI, SE	KADUS KULANGA	✓	

JUMLAH	8	4
---------------	----------	----------

Sumber data kantor desa bulo-bulo



Hasil konsuner yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat penerima BLT dan pemerintah desa mengungkapkan beberapa hambatan terhadap system penyaluran BLT Selain itu pemerintah desa juga memiliki keluhan pada saat pendataan masyarakat penerima BLT karna banyak masyarakat yang mendata di diri mereka padahal mereka tidak termasuk kriteria penerima BLT akibat ketidak validtan data ini yang membuat penyaluran BLT menjadi terhambat.

selain itu terdapat juga pada saat penyaluran dana dimana pada saat penyaluran dana BLT terjadi gangguan oprasional pada saat pencairan dana.maka dari itu pertanggung jawaban pihak pengelolah BLT pada saat pencairan dana mereka harus mengusahakan agar pencairan dana tersebut

dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan sehingga masyarakat tidak merasa kecewa karna keterlambatan penerimaan dana desa.

C. Pembahasan

Pada proses penyaluran Bantuan Langsung tunai (BLT) di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto telah dilaksanakan sejak tahun 2005, Menurut hasil konsuner yang saya lakukan terhadap Pemerintah dan juga Masyarakat penerima Bantuan langsung tunai bahwa penyaluran bantuan langsung tunai telah berjalan dengan lancar tetapi tidak merata tentunya pemerintah desa telah melakukan dengan prosedur sebelumnya menetapkan penerima Bantuan langsung tunai.pemerintah desa pertama melakukan observasi kerumah rumah Masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan langsung tunai pada setiap dusun untuk memastikan kelayakan para penerima untuk menerima bantuan langsung tunai.kemudian pemerintah desa memelakukan pendataan Masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dari hasil observasi tersebut yang Dimana pada skema bantuan akan diberikan ini terbagi untuk bantuan bagi Masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun.

pemerintah desa berkoordinasi untuk memastikan data data yang didapatkan telah pantas menerima bantuan langsung tunai dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi kemudian melakukan pendataan ulang dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan kemudian data yang telah didapatkan akan disetor ke sekertaris desa.tentunya penyaluran bantuan langsung tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban Masyarakat miskin.

Pemerintah desa juga terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa Bulu-Bulu untuk memberikan pemahaman tentang bantuan langsung tunai ini. Pada tahap sosialisasi ini dilakukan di kantor desa. Sosialisasi ini dihadiri para calon penerima bantuan langsung tunai yang terdiri dari kepala rumah tangga dan yang hidup sebatang kara atau sasaran utama bantuan ini juga disini dijelaskan tentang bagaimana tujuan dari bantuan ini yakni secara umum yakni bantuan kesejahteraan sosial dan juga Masyarakat yang hilang mata pencariannya.

Dan untuk penerima bantuan langsung tunai ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yang merupakan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerapan Bantuan langsung tunai. Dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemerintah desa dan juga Masyarakat penerima bantuan langsung tunai di desa Bulu-Bulu bahwa sistem penyaluran bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan dengan terstruktur dimulai dari pendataan yang akan nantinya ditetapkan oleh pemerintah desa dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi data. Dari hasil tersebut dan hasil tersebut. Masyarakat desa Bulu-Bulu merasakan hal tersebut dimana penentuan tersebut Masyarakat yang layak menerima Bantuan langsung tunai. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa penerima bantuan langsung tunai di desa Bulu-Bulu sebanyak 52 masyarakat yang tersebar di 3 dusun yang ada di desa Bulu-Bulu. Dimana data tersebut sudah valid dan sudah masuk di kriteria penerima bantuan langsung tunai.

Hak dari setiap penerima bantuan langsung tunai yaitu adalah bantuan berupa uang tunai dengan nominal yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kriterianya. Dan Adapun kewajiban kewajiban dari bantuan langsung tunai yaitu

memiliki faktor penghambat dalam penyaluran bantuan langsung tunai didesa Bulu-Bulo lebih banyak mengeluh tentang keterlambatan penyaluran dana bantuan langsung tunai dan keluhan data-data masyarakat yang tidak akurat.akan tetapi secara umum dapat dilihat bahwa besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan langsung tunai terutama untuk meringankan beban dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai didesa Bulu-Bulo,Kecamatan Arungkeke,Kabupaten Jeneponto sudah dilaksanakan dengan baik tetapi tidak merata.artinya bantuan ini sangat penting bagi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya atau masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan yang diharapkan pemerintah desa.penyaluran ini juga mencapai sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah des itu sendiri.Terkait dengan penyaluran bantuan langsung tuni,masyarakat sangat antusias menyambut penyaluran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.sehingga hal ini.

Menurut beberapa masyarakat dengan ada bantuan langsung tunai ini dapat meringankan beban masyarakat terutam masyarakat yang tidak memiliki penghasilan.Akan tetapi ditemukan beberapa hambatan seperti data masyarakat yang tidak akurat dan lambatnya pencairan dana desa serta masih banyak masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkan bantuan.penyaluran bantuan langsung tunai didesa Bulu- Bulo diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah desa namun seiring berjalannya waktu dengan sosialisai,pengawasan dari pihak

pemerintah desa didesa Bulu-Bulu tersebut berjalan dengan baik.pemerintah desa sebagai penerima bantuan saatini sudah lebih sadar akan pentingnya bantuan ini. menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai didesa Bulu-Bulu berjalan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis kebermanfaatan bantuan dana sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto". Maka disimpulkan bahwa Pemanfaatan bantuan langsung tunai sebelumnya bukan Hal yang baru di Desa Bulo-Bulo, Meskipun banyak bantuan dana sosial di desa Bulo-Bulo penyaluran bantuan dana sosial berbasis tunai mulai sering di gunakan pada tahun 2005, pada saat proses penyaluran dana bantuan sosial di desa Bulo-bulo sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu sejak adanya bantuan langsung tunai sejak tahun 2005, meskipun pada tahun itu desa Bulo-Bulo memiliki banyak bantuan dana sosial akan tetapi dana bantuan yang berdampak yang diberikan adalah bantuan langsung tunai, tapi semenjak tahun 2005 akhir hingga sekarang hampir 80% proses peyaluran dana bantuan langsung tunai tersalurkan, untuk memudahkan proses penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan pendata oleh pelayanan desa kemudian sekertaris desa melalukan falidasi data yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT pada masyarakat yang kurang mampu, seperti yang kita ketahui penerima dana bantuan langsung tunai merupakan kriteria masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai.

pemerintah desa mengungkapkan beberapa hambatan terhadap system penyaluran BLT Selain itu pemerintah desa juga memiliki keluhan

pada saat pendataan masyarakat penerima BLT karna banyak masyarakat yang mendata di diri mereka padahal mereka tidak termasuk kriteria penerima BLT akibat ketidak validan data ini yang membuat penyaluran BLT menjadi terhambat. selain itu terdapat juga pada saat penyaluran dana dimana pada saat penyaluran dana BLT terjadi gangguan oprasional pada saat pencairan dana. maka dari itu pertanggung jawaban pihak pengelola BLT pada saat pencairan dana mereka harus mengusahakan agar pencairan dana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan sehingga masyarakat tidak merasa kecewa karna keterlambatan penerimaan dana desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut

1. Bagi pemerintah desa melakukan pemantauan secara bertahap untuk melihat kondisi masyarakat, sebaiknya dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai harus menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan seperti setiap bulan bukan 2 bulan sekali. serta diberikan kejelasan tentang keterlambatan pencairan dana BLT yang sering terjadi
2. Bagi masyarakat desa yang menerima dana bantuan langsung tunai sebaiknya menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari hari

DAFTAR PUSTAKA

- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (1988). Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV. Surabaya: Bina Ilmu.
- Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Adiprakoso, K. A., & Yuliati, A. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan sosial desa covid-19 di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Spesial Issue 6), 2166–2173.
- Astari, L. D. (2021). *Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial Di Era Pandemi Covid-19*. 19.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu* , 15(2), 77–84.
- Indrajaya, & Ardha, D. J. (2022). Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.547>
- Jehosua, A. (2022). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19*. 5, 6–15.
- Jumarianti, J., & Harun, T. (2023). Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Terantang Kabupaten Barito Kuala. *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.31602/as.v8i1.10955>
- Maharsani, T. H. (2022). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50–72.

- Mukhlisah, A. N., & Irfan, M. (2023). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 2(9), 185–190.
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi JPENSI*, 6(3), 263. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Ayu, S., Pasaribu, E., Lolita, S., Delia, M., Yuniar, U., Reviyanti, V., & Yulistian, &. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1277.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2021). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 199–210. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Puryanti, P., Herdiana, D., & Darmayanti, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 3878–3889. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3022>
- Putra, T., & Medinal, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kemiskinan Di Kelurahan Tuatunu Indah Kota *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis*, 6(November), 337–347. <https://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JIPMB/article/view/457>
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 55–67. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.831>

- Safitri, R. E., & Pradana, G. W. (2023). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan) Abstrak. *Publika*, 11(2), 1903–1914.
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(2), 170–188.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5324>
- Studies, H., & Sukmasari, D. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an*. 3(1), 1–16.
- Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.6>
- Syamsudin, M. (2022). Implementasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dampak Pandemi Covid-19. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf*
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/download/577/598>
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*, iii(110), 79–92.
- Wulandari, N. S. (2021). *Konversi Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang ...*. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8380/%0Ahttps://eprints.uniska-bjm.ac.id/8380/1/Artikel_Nur Suci Wulandari.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8380/%0Ahttps://eprints.uniska-bjm.ac.id/8380/1/Artikel_Nur%20Suci%20Wulandari.pdf)
- Yunika, R., & Shella, R. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid -19) Di Provinsi Gorontalo. *Yume : Journal of Management*, 4(3), 157–164.
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lembar Observasi

No	Observasi	Indikator	Item Pertanyaan	KET	
				Y	T
	BANTUAN LANGSUNG TUNAI	1. sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai	➤ Apakah kantor memiliki manajemen yang baik?		
			➤ Apakah kantor desa memiliki ruangan sendiri untuk staf kantor desa?		
			➤ Apakah terdapat ruangan khusus untuk sekertaris desa untuk manajemen data desa?		
			➤ Apakah terdapat ruangan khusus kepala desa?		
		2. Tantangan dan hambatan penyaluran bantuan langsung tunai	➤ Apakah WiFi berfungsi dengan baik dalam mengimput data BLT?		
			➤ Apakah peralatan untuk mendata data masyarakat itu memenuhi ?		
			➤ Apakah sarana dan prasarana desa sudah memenuhi standar kebutuhan desa?		
			➤ Apakah standar kebutuhan pendataan untuk mendata masyarakat sudah memenuhi?		

Lembar Kuesioner

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah pernah menerima bantuan?		
2	Apakah menurut Bapak/ibu dengan adanya penyaluran BLT sangat membantu kesejahteraan masyarakat?		
3	Apakah ada hambatan penyaluran BLT ini?		
4	Apakah uang pembagian BLT dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Bapak/Ibu?		
5	Seperti apa prosedur dalam penyaluran BLT?		
6	Apakah ada perubahan yang dirasakan setelah menerima BLT yang disalurkan?		
7	Setelah menerima dan menggunakan BLT Apakah Bapak/ibu merasakan hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya		
8.	Apakah penyaluran penerimaan BLT belum tepat waktu?		



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865500 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4057/05/C.4-VIII/IV/1445/2024

19 April 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 Syawal 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 16178/FKIP/A.4-II/IV/1445/2024 tanggal 18 April 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUTIARA BAKRI

No. Stambuk : 10543 1100220

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS KEBERMANFAATAN BANTUAN DANA SOSIAL PEMERINTAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 April 2024 s/d 24 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, Idranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 9108/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4075/05/C.4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 19 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUTIARA BAKRI
Nomor Pokok	: 105431100220
Program Studi	: PPKn
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PRUVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Untuk melakukan penelitian terkait judul yg saya angkat "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 April s.d 21 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 April 2024

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tambahan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peringat



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN ARUNGKEKE
DESA BULO-BULO**

Alamat : Jln Lanto Daeng Pasewang Dusun Bulo-Bulo Hp.08114442708/081335699127

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR: 371 / SKSP / DBB / XI / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **IRSAL, SE**
Jabatan : **Kepala Desa Bulo-Bulo**
Dengan ini menerangkan bahwa :
N a m a : **MUTIARA BAKRI**
Nomor NIM : **105431100220**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Universitas : **Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)**

Telah melakukan penelitian di Desa Bulo-Bulo ,dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
**"ANALISIS KEBERMANFAATAN BANTUAN DANA SOSIAL PEMERINTAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BULO-BULO KABUPATEN
JENPONTIO"**

Adapun waktu penelitian Tanggal 21 april 2024 s/d 21 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 02 Juli 2024

Kepala Desa Bulo-Bulo

IRSAL, SE



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Jumat..... Tanggal 27 syaban.....1445...H bertepatan tanggal 08 1 Maret.....2024..M bertempat di ruang Prodi PPKn..... kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Analisis ~~Bantu~~ Kebermanfaatan Bantuan Dana Sosial Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto.

Dari Mahasiswa :

Nama : Mutiara Bakri
 Stambuk/NIM : 105431100220
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Moderator : Ibu Rismawati S.Pd., M.Pd
 Hasil Seminar :
 Alamat/Temp : Jl. Talasapang 1 / 08134239199A

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Diperbaiki sesuai dengan arahan Bapak/Ibu Dosen penyaji (Lanjutkan ke penelitian)

Disetujui

Moderator : Rismawati, S.Pd, M.Pd. ()
 Penanggap I : Dr. Andi Suglata, M.Pd. ()
 Penanggap II : Dr. Suardi S.Pd. M.Pd. ()
 Penanggap III : Dr. Abdul Aziz, S.Pd. M.Pd. ()

Makassar, 8 Maret.....2024..


 Ketua Program Studi
 (Dr. Mutiara Bakri, S.Pd., M.Pd.)
 NBM: 088461



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 150 Makassar
Telp : (0411) 500337 - 500337 (Fax)
Faksimil : 0411-500338 atau 0411-500339
Web : <http://ikp.umh.ac.id>



LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : MUTIARA BAKRI

Nim : 105431100220

Prodi : PPKn

Judul : Analisis Keberuntungan Bantuan Dana Sosial Pemerintah
terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulu-Bulu
Kabupaten Jeneponto.

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Paraf
1	Dr. Andi Sugiaty M.Pd.	- Latar Belakang Masalah - Rumusan Masalah - Metode Penelitian	
2	Dr. Suardi, S.Pd., M.Pd.	- Kutipan	
3	Dr. Abdul Aziz, S.Pd., M.Pd.	- Instrumen Penelitian	
4	Rismawati S.Pd., M.Pd.	- Latar Belakang masalah - Rumusan masalah - Metode penelitian.	

Makassar, 20

Ketua Program Studi

(Dr. Nurul Huda, S.Pd., M.Pd.)

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Bakri	Pembimbing I : Dra.Andi Sugiaty M.Pd
NIM : 105431100220	NIDN : 0018056002
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : ANALISIS KEBERMANFAATAN BANTUAN DANA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYRAKAT DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	4/06/2024	Revisi Lembar Peta (PBB I)	§
2.	5/06/2024	Tujuan, Kelayakan, Tujuan, Maksud PBB II	§
3.	10/07/2024	Revisi PPKn U	§
4.	15/07/2024	Penyusunan skripsi bagian 2 & 3 ke satu peneliti by	§
5.	19/07/2024	Aee	§
6.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuai dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Bakri.	Pembimbing I: Rismawati S.Pd.,M.Pd..
NIM : 105431100220	NIDN : 0910078903
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : Analisis kebermanfaatan bantuan dana sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	7, 7, 2024	Materi penelitian. master table	
2.	14, 7, 2024	Rumbar data dan perbuku	
3.	20, 7, 2024	Penyuluhan data pembuku	
4.	28, 7, 2024	Abstrak di perbaiki sesuai petunjuk untuk pedoman penulisan	
5.			
6.	17, 8, 2024	Ala / 17, 8, 2024	

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

AB I Mutiara bakri - 105431100220

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

LULUS 11%
turnitin

6% PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

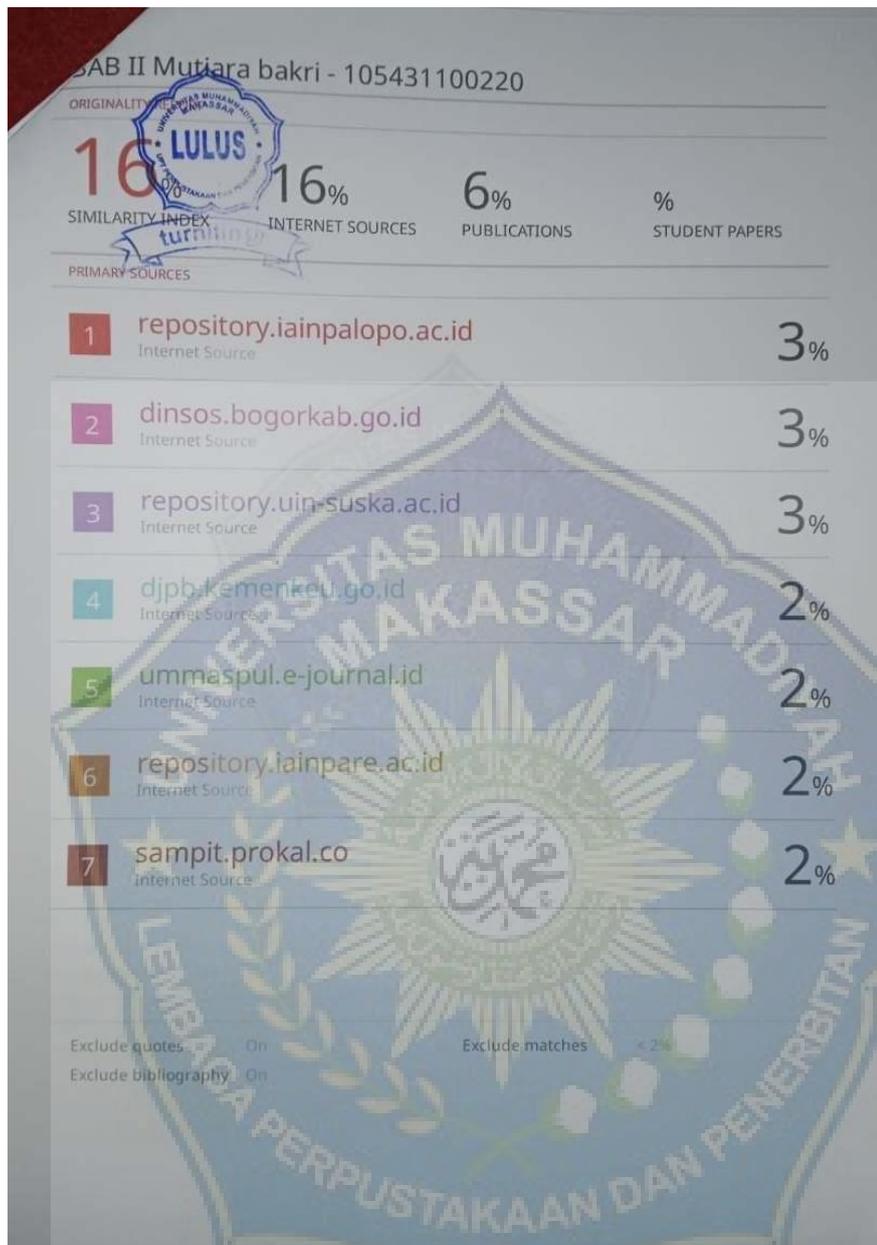
PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	repository.ummat.ac.id Internet Source	3%
3	AGUS ARIYANTO, Aji Supriyanto. "IMPLEMENTASI METODE AHP-SAW DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERTAN BANSOS DI KELURAHAN JLEGONG", Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik, 2022 Publication	2%
	nasional.kontan.co.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



III Mujiara bakri - 105431100220

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id	Internet Source	2%
2	repository.universitaspahlawan.ac.id	Internet Source	2%
3	etheses.iainponorogo.ac.id	Internet Source	2%
4	journal.ikopin.ac.id	Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id	Internet Source	2%
6	repository.upi.edu	Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Mutiara bakri - 105431100220

ORIGINALITY REPORT

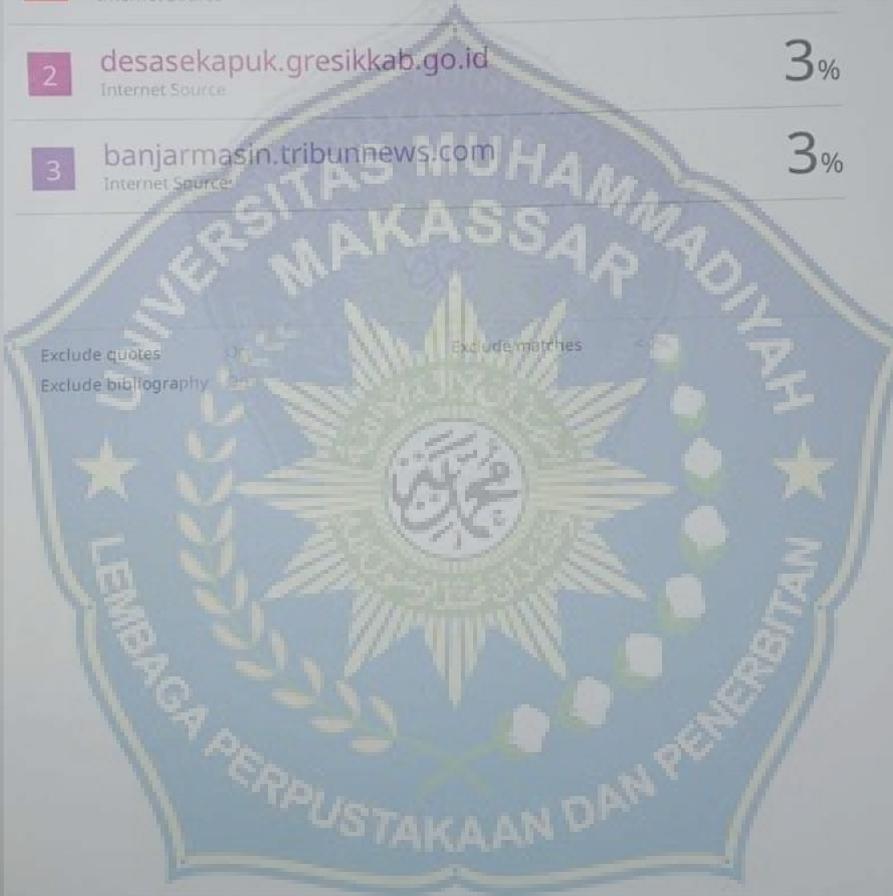
9% Turnitin

SIMILARITY INDEX: 9% INTERNET SOURCES, 3% PUBLICATIONS, % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	umsu.ac.id Internet Source	4%
2	desasekapuk.gresikkab.go.id Internet Source	3%
3	banjarmasin.tribunnews.com Internet Source	3%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

V Mutiara bakri - 105431100220

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id	4%
	Internet Source	

Exclude quotes Exclude matches

Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



Mutiara Bakri, lahir pada tanggal 04 Oktober 2002 di Kulanga Desa Bulo-Bulo, kec. Arungkeke, Kab. Jenepono. Merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda Bakri Dan Ibunda Suriani.

Penulis memulai memasuki dunia pendidikan sekolah TK PGRI Bulo-Bulo pada tahun 2006 dan tamat 2008 ,Sekolah dasar di SDN 106 Bulo-Bulo tahun 2008 dan tamat di tahun 2013. Kemudian di tahun yang samapenulis melanjutkan pendidikan di MTs Mannilingi Bulo-Bulo selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) SMA NEGERI 5 JENEPONTO selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.